



RENCANA AKSI
PENANGGULANGAN BENCANA
TAHUN 2025



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TABANAN
Jl. Gatot Subroto Nomor 2 Kediri - Tabanan Telp (0361) 811171
2025

KATA PENGANTAR

Atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami bersyukur dapat menyusun Rencana Aksi Penanggulangan Bencana Tahun 2025 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dokumen ini adalah hal yang wajib dilakukan oleh setiap unit kerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam kerangka *good governance* seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perpres tersebut mewajibkan instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang diambil. Dokumen perencanaan ini memberikan gambaran perencanaan kinerja BPBD dalam pembangunan daerah.

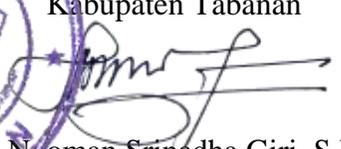
Rampungnya dokumen ini tidak terlepas dari komitmen dan kerja keras aparatur BPBD. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan data dan informasi sehingga dokumen ini selesai tepat pada waktunya.

Dengan berbagai keterbatasan yang ada, dimohon masukan dan sarannya agar lebih meningkatnya kinerja Badan Penanggulangan Bencana secara berkelanjutan untuk dapat mewujudkan visi dan misi RPJMD Semesta Berencana dan sasaran strategis yang tertuang dalam rencana startegis tahun 2021-2026

Tabanan, 2 Januari 2025

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tabanan




Nyoman Sripadha Giri, S.E
Pembina Tk. I (IV/ b)
NIP. 19740624 200604 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum	3
1.3 Tujuan	3
BAB II RENCANA AKSI.....	4
2.1 Sasaran Strategis	4
2.2 Arah Kebijakan	4
2.3 Program dan Kegiatan	5
2.4 Matrik Rencana Aksi	5
BAB III PENUTUP	11
3.1 Kesimpulan	11
3.2 Saran	11
Lampiran	

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Perencanaan pembangunan telah diarahkan untuk adanya sinergisitas prioritas pembangunan pusat dan daerah. Perencanaan dalam penanggulangan bencana disusun dan ditetapkan agar seluruh kegiatan pada setiap tahapan penanggulangan bencana dapat berjalan dengan terkordinasi, terpadu, terarah dan menyeluruh dengan baik.

Pemerintah pusat telah menetapkan Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2040, dimana dalam Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) melalui tiga strategi yaitu : 1). Rencana aksi dalam bentuk mitigasi bencana, 2).Rencana penanggulangan kedaruratan bencana dalam bentuk rencana kontigensi, dan 3). Rencana pemulihan prabencana dalam bentuk rencana rekuntruksi dan rehabilitasi pasca bencana.

Prioritas pembangunan Provinsi Bali telah sinergis dengan prioritas pembangunan Kabupaten Tabanan, sehingga dalam kebencanaan sesuai prioritas ketiga yakni jaminan sosial dan ketenagakerjaan maka pemerintah daerah terus berinovatif dalam mewujudkan daerah aman dan nyaman sehingga perekonomian dan inventasi dapat berkembang.

Perencanaan kebencanaan di Kabupaten Tabanan telah disusun sesuai dengan amanah Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 yang disenergiskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Tahun 2021-2026. Dokumen perencanaan kinerja tersebut telah mengamanahkan untuk menjadikan Tabanan sebagai kabupaten tangguh bencana dimulai dari desa.

Kabupaten Tabanan adalah satu dari sembilan kabupaten/kota di wilayah Provinsi Bali dengan wilayah terluas kedua setelah Kabupaten Buleleng dengan topografi yang *nyegara gunung* atau mulai dari laut sampai dengan pegunungan. Kondisi yang demikian itu menyebabkan berpotensi terkena ancaman bencana. Pada umumnya resiko bencana yang terjadi di Kabupaten Tabanan meliputi bencana akibat faktor geologi (gempa bumi, tsunami), bencana akibat hydrometeorologi (banjir, tanah longsor, angin puting beliung), bencana akibat faktor biologi (wabah penyakit manusia, penyakit tanaman, ternak, hama tanaman) serta kegagalan teknologi (kecelakaan industri, kecelakaan transportasi, pencemaran bahan kimia). Bencana akibat ulah manusia terkait dengan konflik antar manusia akibat sengketa tapal batas, konflik adat, dan konflik akibat sistem politik.

Mengingat Kabupaten Tabanan rawan akan bencana, maka pemerintah Kabupaten Tabanan membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Tabanan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan tanggal 28 Nopember 2011 dan dirubah Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 09 Tahun 2022 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan dengan melaksanakan tugas utama dalam penanggulangan bencana dengan menganut prinsip-prinsip: menjauhkan masyarakat dari bencana, menjauhkan bencana dari masyarakat, hidup harmoni dengan bencana (*living in harmony with disaster*) dan memperhatikan *local wisdom* serta potensi-potensi yang tersedia. Potensi yang tersedia merupakan sarana yang harus didayagunakan untuk mengurangi dampak ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan guna dikonversikan dan diformulasikan menjadi peluang, dan menjamin pembangunan dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan telah menetapkan strategi dalam manajemen bencana dengan mempertimbangkan isu-isu strategis yang dihadapi sehingga dapat melakukan inovasi program dan kegiatan prioritas. Adapun isu strategis yang dihadapi dan prioritas ditangani di tahun 2025 yaitu : 1). Pelayanan informasi (edukasi) rawan bencana kepada multi pihak, 2). Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana untuk investasi pembangunan, 3). Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana untuk pulih lebih cepat (*risilien*), 4) Penguatan sumber daya manusia kebencanaan.

Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah berupaya menangani isu staretgis yang dihadapi dengan program prioritas baik yang sumber dananya dari APBN maupun APBD agar multi pihak (*stakeholder*) semuanya dapat memenuhi harapan pemerintah pusat maupun daerah untuk menjadi tanggap, siaga, dan tangguh dalam menghadapi risiko bencana.

Peran birokrasi yang akuntabel dalam melaksanakan amanah RPJMD Semesta Berencana khususnya dalam manajemen bencana menjadi tuntutan yang harus segera direspon oleh semua *stakeholder*. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2011 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia Tahun 2010-2025. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan *good and clean government* yang telah ditetapkan melalui percepatan implementasi reformasi birokrasi. Dengan demikian, pemerintah melakukan penataan kembali terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah, dimana birokrasi akan menjadi tulang punggung perubahan yang didukung oleh aparatur berakhlak.

Penyusunan rencana aksi daerah dalam penanggulangan bencana harus didasari atas isu-isu strategis yang terus berkembang, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan yang dituangkan dalam rencana staretgis perangkat daerah. Oleh karena

itu maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara berkala melakukan pemutahiran rencana aksi penanggulangan bencana yang dikolaborasikan dengan rencana aksi penerapan SPM sub bencana.

1.2. Landasan Hukum.

Landasan hukum penyusunan rencana aksi penanggulangan bencana di Kabupaten Tabanan Tahun 2025 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah .
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026(Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan;
- f. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 46) ;

1.3. Tujuan.

Tujuan dari penyusunan dokumen perencanaan ini adalah memberikan informasi rencana aksi penanggulangan bencana di Kabupaten Tabanan tahun 2025 dan arah kebijakan strategis pemenuhan SPM bidang urusan trantibun di sub urusan bencana.

II. RENCANA AKSI

2.1 Sasaran Strategis

RPJMD Semesta Berencana menjadi acuan dalam perencanaan rencana aksi yang selaras dengan asta program. BPBD melaksanakan amanah :

- Misi pertama : Merwujudkan masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam prikehidupan (Aman)
- Tujuan pertama : Terwujudnya masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam prikehidupan
- Sasaran pertama : Terjaminnya pemenuhan hak pelayanan dasar warga
- Asta program ketujuh : pembangunan kesejahteraan rakyat.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan, dari tujuan terwujudnya Tabanan yang tangguh dalam menghadapi bencana dilanjutkan dengan sasaran yang ingin dicapai adalah pengurangan risiko bencana.

Beranjak dari tujuan dan sasaran di atas, maka disusun strategi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sebagai berikut :

- a. Melakukan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana.
- b. Respon cepat terhadap penanganan bencana.
- c. Melakukan verifikasi dan monitoring bencana sehingga bansos tepat sasaran.
- d. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan sistem monev kinerja.

2.2 Arah Kebijakan

Kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Tabanan menjadi dasar pilihan tindakan yang dapat diambil oleh pemanku kepentingan untuk meningkatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terjadi di Kabupaten Tabanan dengan berdasarkan kajian risiko di Kabupaten Tabanan. Adapun arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan sebagai berikut;

- a. Pengurangan risiko bencana dengan pembentukan destana, sosialisasi, diklat kebencanaan, di wilayah Kabupaten Tabanan.
- b. Melayani masyarakat dalam penanggulangan bencana yang tepat waktu dalam pencarian dan evakuasi korban bencana.
- c. Mengembalikan fungsi obyek-obyek vital yang rusak akibat bencana.
- d. Melakukan bimtek guna meningkatkan kualitas kinerja.

2.3 Program dan Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 dirumuskan secara komperhensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama lima tahun yang akan datang sesuai program pembangunan daerah dengan mengaitkan pada misi RPJMD Tahun 2021-2026.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dari startegi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi.

2.4 Matrik Rencana Aksi

Adapun rencana aksi program dan kegiatan prioritas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan terdiri dari 1 (dua) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan 1 (satu) program penanggulangan bencana yang terdistribusi dalam 10 (sepuluh) kegiatan prioritas seperti berikut ini.

Tabel Kegiatan Prioritas dan Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Kegiatan Prioritas	Rencana Aksi Kegiatan	Instansi
A	PROGRAM PENUNJNAG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Musrenbang	Menyerap usulan, data dan informasi kebencanaan dari masyarakat rawan bencana	BNPB, BPBD, Bappeda, Bakeuda
		Kajian partisipatif	Melakukan analisis prioritas kebutuhan masyarakat	BPBD, Bappeda, Bakeuda
		Kajian teknokratik	Melakukan Focus Group Discusion dan Forum OPD	BPBD, Bappeda, Bakeuda
		Kajian pokok-pokok pikiran dewan	Mengikuti rapat kerja dan menyusun telaah staf perencanaan dan anggaran	BPBD, Bappeda, Bakeuda, Setwan
b	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dan informasi kebencanaan urusan wajib dasar bidang kebencanaan	BNPB, BPBD, Bappeda, Bakeuda, Setda, BPS, Satpol PP

		Penyusunan laporan kinerja perangkat daerah urusan wajib dasar bidang kebencanaan	Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dan informasi kinerja pelayanan administrasi dan pelayanan publik penanggulangan bencana	BNPB, BPBD, Bappeda, Bakeuda, Setda, BPS, Satpol PP, Camat
2	Administrasi keuangan PD			
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Laporan gaji Tunjangan ASN Tunjangan kinerja Laporan honorarium	Penatausahaan gaji Penatausahaan tunjangan Penatausahaan TPP Penatausahaan honorarium	Bakeuda BPBD Inspektorat
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	LRA Laporan pajak Laporan KIR, KIB Laporan persediaan	Pelaporan LRA Pelaporan pajak Pelaporan KIR, KIB Pelaporan persediaan	Bakeuda BPBD Inspektorat
3	Administrasi umum PD			
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan peralatan listrik dan penerangan kantor	Identifikasi dan pemenuhan peralatan listrik dan penerangan kantor	Bakeuda, BPBD, rekanan
b	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan alat kebersihan kantor	Identifikasi dan pemenuhan alat kebersihan kantor	Bakeuda, BPBD, rekanan
c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan kelengkapan upacara keagamaan	Identifikasi dan pemenuhan kelengkapan upacara keagamaan	Bakeuda, BPBD, rekanan
d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Identifikasi dan pemenuhan penjilidan dan foto copy dokumen	Bakeuda, BPBD, rekanan
e	Penyediaan bahan material	Penyediaan bahan material kantor	Identifikasi dan pemenuhan ATK, kertas, tinta printer	Bakeuda, BPBD, rekanan
f	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Mengikuti rakor luar daerah	Memenuhi undangan rakor instansi pusat	Bakeuda, BPBD, rekanan
g	Penatausahaan arsip dinamis SKPD	-	-	Tidak dapat anggaran
4	Penyediaan jasa penunjang urusan PD			
a	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan materai untuk dokumen PD	Pengelolaan penggunaan materai sesuai kebutuhan prioritas	Bakeuda, BPBD, rekanan
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran listrik, air, telepon, internet	Pengelolaan listrik, air, telepon, internet sesuai kebutuhan prioritas	Bakeuda, BPBD, rekanan
c	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Pembayaran jasa tenaga non ASN dan kinerja Non ASN	Penatausahaan jasa non ASN, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan, jaminan kematian dan kinerja Non ASN	Bakeuda, BPBD, rekanan
5	Pengadaan BMD penunjang urusan PD			
a	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	-	-	Tidak dapat anggaran
6	Pemeliharaan BMD penunjang urusan PD			
a	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak, dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas layak operasional	Perbaikan dan pembayaran pajak kendaraan dinas Penyediaan BBM dan oil	Bakeuda, BPBD, rekanan
b	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Penyediaan suku cadang alat kerja	Identifikasi dan penyediaan suku cadang dan servis kendaraan, computer, printer	Bakeuda, BPBD, rekanan

B	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota			
a	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per jenis Bencana)	Sosialisasi mitigasi bencana	Sosialisasi mitigasi bencana kepada aparatur dan masyarakat	BNPB, BPBD Camat Babinsa Babinkabtibnas. Forum PRB
			KIE pada Satuan Pendidikan Aman Bencana	BPBD, Forum PRB, Guru, Siswa
		Penyebarluasan informasi daerah rawan bencana	Pemasangan peta, spanduk, baliho daerah rawan bencana	Aparat desa
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana			
a	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Penguatan desa tangguh bencana	FGD penguatan destana	BNPB, BPBD Camat Babinsa Babinkabtibnas
			Pembentukan relawan desa	BPBD, Babinsa, Babinkabtibnas
			Pengukuhan destana	BPBD, Perbekel
		Penguatan IKD dan IRB desa	Pendampingan instrument IKD dan IRBI desa	BPBD, Aparat desa, BPD
b	Penyusunan Rencana Kontijensi	Penyusunan rencana kontijensi per jenis bencana	FGD isu-isu strategis kebencanaan	BNPB, BPBD, Camat, TNI, Polri, Aparat Desa, FRB, RAPI, OPD lainnya
			Renkon tsunami, Renkon gempa bumi, Renkon banjir, Renkon cuaca ekstim, Renkon tanah longsor	BNPB, BPBD, Camat, TNI, Polri, Aparat Desa, FRB, RAPI, OPD lainnya
c	Gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana	Simulasi dan gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Simulasi dan gladi kesiapsiagaan	BNPB, BPBD, PMI, SAR, Sekolah, Relawan
		Forum kesiapsiagaan menghadapi bencana	FGD kesiapsiagaan menghadapi bencana	BPBD, Forum PRB, guru, aparat desa
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
a	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Penyediaan peralatan penanganan darurat bencana	Penyediaan peralatan darurat bencana	BNPB, BPBD, TAPD, BUMN, Swasta
			Penyediaan peralatan pengungsi	BNPB, BPBD, TAPD, BUMN, Swasta
		Penyediaan logistik kebencanaan	Penyediaan logistik kebencanaan	BNPB, BPBD, TAPD, BUMN, Swasta
			Distribusi logistik kebencanaan	BPBD, TRC, relawan
		Penanganan bencana	Respon time kebencanaan	BNPB, BPBD, TRC, PMI, SAR, TNI, POLRI,

				Relawan
4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			
a	Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Survey lokasi wilayah terdampak bencana	Identifikasi dan survey lokasi wilayah terdampak bencana	BPBD, OPD terkait, Aparat Desa, Pekaseh, Adat, dll
			Pengolahan data, analisis dan penyusunan kajian pasca bencana	BPBD, Bappeda, Bakeuda
		Koordinasi rehabilitasi dan rekontruksi	Koordinasi rencana rehabilitasi pasca bencana	BNPB, BPBD, Bakeuda, OPD terkait
			Koordinasi rencana rekontruksi pasca bencana	BNPB, BPBD, Bakeuda, OPD terkait

Rencana aksi tahun 2025 atas program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota tersebut dijabarkan lebih terinci untuk memudahkan mengukur pencapaian kinerja di tahun perencanaan. Adapun rinciannya seperti berikut ini.

No	Kegiatan / Sub kegiatan	Kegiatan Teknis	Rincian Kegiatan	Rencana Triwulanan			
				I	II	III	IV
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Musrenbang	Menyerap usulan, data dan informasi kebencanaan dari masyarakat rawan bencana	1 dok			
		Kajian partisipatif	Melakukan analisis prioritas kebutuhan masyarakat	1 dok			
		Kajian teknokratik	Melakukan Focus Group Discussion dan Forum OPD	1 dok	1 dok		
		Kajian pokok-pokok pikiran dewan	Mengikuti rapat kerja dan menyusun telaah staf perencanaan dan anggaran	1 dok	1 dok		
b	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dan informasi kebencanaan urusan wajib dasar bidang kebencanaan	2 lapor			
		Penyusunan laporan kinerja perangkat daerah urusan wajib dasar bidang kebencanaan	Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dan informasi kinerja pelayanan administrasi dan pelayanan publik penanggulangan bencana	1 lapor	1 lapor	1 lapor	1 lapor
2	Administrasi keuangan PD						
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Laporan gaji Tunjangan ASN Tunjangan kinerja Laporan honorarium	Penatausahaan gaji Penatausahaan tunjangan Penatausahaan TPP Penatausahaan honorarium	1 lapor	1 lapor	1 lapor	1 lapor
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	LRA Laporan pajak Laporan KIR, KIB Laporan	Pelaporan LRA Pelaporan pajak Pelaporan KIR, KIB Pelaporan persediaan	1 lapor	1 lapor	1 lapor	1 lapor

		persediaan					
3	Administrasi umum PD						
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan peralatan listrik dan penerangan kantor	Identifikasi dan pemenuhan peralatan listrik dan penerangan kantor	1 lapor	1 lapor	1 lapor	1 lapor
b	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan alat kebersihan kantor	Identifikasi dan pemenuhan alat kebersihan kanto	1 lapor	1 lapor	1 lapor	1 lapor
c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan kelengkapan upacara keagamaan	Identifikasi dan pemenuhan kelengkapan upacara keagamaan	1 lapor	1 lapor	1 lapor	1 lapor
d	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Penyediaan barang cetakaan dan penggandaan	Identifikasi dan pemenuhan penjilidan dan foo copy dokumen	1 lapor	1 lapor	1 lapor	1 lapor
e	Penyediaan bahan material	Penyediaan bahan material kantor	Identifikasi dan pemenuhan ATK, kertas, tinta printer	1 lapor	1 lapor	1 lapor	1 lapor
f	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Mengikuti rakor luar daerah	Memenuhi undangan rakor instansi pusat	1 lapor	1 lapor	1 lapor	1 lapor
g	Penatausahaan arsip dinamis SKPD	Tata kelola arsip dinamis dan arsip tetap	Penataan arsip dinamis dan arsip tetap	1 lapor	1 lapor	1 lapor	1 lapor
4	Penyediaan jasa penunjang urusan PD						
a	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan materai untuk dokumen PD	Pengelolaan penggunaan materai sesuai kebutuhan prioritas	1 lapor	1 lapor	1 lapor	1 lapor
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran listrik, air, telepon, internet	Pengelolaan listrik, air, telepon, internet sesuai kebutuhan prioritas	1 lapor	1 lapor	1 lapor	1 lapor
c	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Pembayaran jasa tenaga non ASN dan kinerja Non ASN	Penatausahaan jasa non ASN, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan, jaminan kematian Non ASN	1 lapor	1 lapor	1 lapor	1 lapor
5	Pengadaan BMD penunjang urusan PD						
a	Peengadaan mebelair	Penagdaan mebelair	Pengadaan meja, kursi, almari		1 lapor		
b	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Pengadaan alat kerja	Pengadaan alat kerja kantor		1 lapor		
6	Pemeliharaan BMD penunjang urusan PD						
a	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak, dan perijinan kendaran dinas operasional atau lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas layak operasional	Perbaikan dan pembayaran pajak kendaraan dinas Penyediaan BBM dan oil	1 lapor	1 lapor	1 lapor	1 lapor
b	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Penyediaan suku cadang alat kerja	Identifiaksi dan penyediaan suku cadang dan servis kendaraan, computer, printer	1 lapor	1 lapor	1 lapor	1 lapor

Rencana aksi teknis tahun 2025 dalam program penanggulangan bencana dirinci seperti berikut ini.

No	Kegiatan / Sub kegiatan	Kegiatan Teknis	Rincian Kegiatan	Rencana Triwulanan			
				I	II	III	IV
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota						
a	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per jenis	Sosialisasi mitigasi bencana	Sosialisasi mitigasi bencana kepada aparaturn dan masyarakat	1 lapor	1 lapor	1 lapor	1 lapor

	Bencana)		KIE pada Satuan Pendidikan Aman Bencana		1 lapor		
		Penyebarluasan informasi daerah rawan bencana	Pemasangan peta, spanduk, baliho daerah rawan bencana	10 kec	10 kec		
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana						
a	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Penguatan desa tangguh bencana	FGD penguatan destana			1 lapor	
			Pembentukan relawan desa			1 lapor	
			Pengukuhan destana				1 lapor
		Penguatan IKD dan IRB desa	Pendampingan instrument IKD dan IRB desa		1 lapor	1 lapor	
b	Pelatihan mitigasi bencana	Identifikasi kebutuhan kompetensi SDM	Koordinasi dengan aparat desa rawan bencana	1 laporan			
		Pelatihan SDM masyarakat rawan bencana	Pelatihan administrasi dan teknis penguatan SDM rawan bencana			50 orang	
c	Penyusunan Rencana Kontijensi	Penyusunan rencana kontijensi per jenis bencana	FGD isu-isu strategis kebencanaan			1 lapor	
			Renkon banjir, Renkon cuaca ekstim, Renkon tanah longsor			1 dok	
d	Gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana	Simulasi dan gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Simulasi dan gladi kesiapsiagaan		1 lapor		
		Forum kesiapsiagaan menghadapi bencana	FGD kesiapsiagaan menghadapi bencana		1 lapor		
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						
a	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Penyediaan peralatan penanganan darurat bencana	Penyediaan peralatan darurat bencana		1 jenis		
			Penyediaan peralatan pengungsi				1 jenis
		Penyediaan logistik kebencanaan	Penyediaan logistik kebencanaan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket
			Distribusi logistik kebencanaan	10 kec	10 kec	10 kec	10 kec
Penanganan bencana	Respon time kebencanaan	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam		
4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana						
a	Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Survey lokasi wilayah terdampak bencana	Identifikasi dan survey lokasi wilayah terdampak bencana	10 kec	10 kec	10 kec	10 kec
			Pengolahan data, analisis dan penyusunan kajian pasca bencana	1 lapor	1 lapor	1 lapor	1 lapor
		Koordinasi rehabilitasi dan rekontruksi	Koordinasi rencana rehabilitasi pasca bencana	1 lapor	1 lapor	1 lapor	1 lapor
			Koordinasi rencana rekontruksi pasca bencana	1 lapor	1 lapor	1 lapor	1 lapor

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan secara berkelanjutan melakukan penyempurnaan rencana aksi untuk menjabarkan RPJMD Semesta Berencana dan Renstra BPBD Tahun 2021-2026. Adapun rumusan rencana aksi daerah yang telah diselaraskan dengan perencanaan kinerja yaitu :

- a. Rencana aksi pada prabencana melalui 7 (tujuh) kegiatan prioritas dengan 10 rencana aksi
- b. Rencana aksi pada tanggap bencana melalui 3 (tiga) kegiatan prioritas dengan 5 rencana aksi
- c. Rencana aksi pada pasca bencana melalui 2 (dua) kegiatan prioritas dengan 4 rencana aksi
- d. Rencana aksi pada penunjang urusan pemerintahan melalui 6 (enam) kegiatan prioritas dengan 15 rencana aksi

3.2 Saran dan Langkah Antisipatif

Rencana aksi penanggulangan bencana baik di pelayanan kantor, prabencana, darurat bencana, dan pasca bencana akan dapat terlaksana dengan baik dan terukur apabila didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, dukungan sarana dan prasarana yang memadai dan dukungan anggaran.

Langkah antisipatif yang diajukan untuk penguatan kapasitas daerah dalam menurunkan indeks risiko bencana adalah kolaborasi semua *pentahelik* untuk menurunkan tingkat kerawanan dan bencana serta meningkatkan kapasitas daerah.

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tabanan



[Handwritten Signature]
I Nyoman Srinadha Giri, S.E
Pembina Tk. I (IV/ b)
NIP. 19740624 200604 1 010

Lampiran

RENCANA AKSI KINERJA DAN ANGGARAN DI BPBD TAHUN 2025

a. TUJUAN STRATEGIS

No	Tujuan Strategis	Indikator	Satuan	Target Kinerja			Anggaran (Rp)			Penanggung jawab	
				Tahunan	Bulan	Target	Program	Tahunan	Bulan		Target
1	Tabanan tanggung dimulai dari desa	Indeks Risiko Bencana	-	144.47	Januari		Penanggulangan bencana	6.308.411.200	Januari	518.068.469	Bid PK, KL, RR, Sekretariat
2	Terwujudnya Kualitas tata Kelola pemerintahan di OPD	Hasil Evaluasi penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	%	85	Pebruari				Pebruari	492.742.139	
					Maret				Maret	734.470.585	
					April				April	586.950.039	
					Mei				Mei	574.323.839	
					Juni				Juni	723.229.585	
					Juli				Juli	542.669.939	
					Agustus				Agustus	425.568.739	
					September				September	423.022.639	
					Oktober				Oktober	472.184.239	
					Nopember				Nopember	413.941.040	
					Desember	144.47			Desember	401.239.948	

B. SASARAN STRATEGIS

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Kinerja			Anggaran (Rp)			Penanggung jawab	
				Tahunan	Bulan	Target	Program	Tahunan	Bulan		Target
1	Pengurangan Risiko Bencana	Persentase waktu tanggap layanan kebencanaan	%	100.00	Januari	100.00	Penanggulangan bencana	6.308.411.200	Januari	518.068.469	Bid PK,
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPBD	Nilai LKJP perangkat daerah	A	81	Pebruari	100.00			Pebruari	492.742.139	Bid KL,
					Maret	100.00	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota		Maret	734.470.585	Bid RR
					April	100.00			April	586.950.039	Sekret
					Mei	100.00			Mei	574.323.839	
					Juni	100.00			Juni	723.229.585	
					Juli	100.00			Juli	542.669.939	
					Agustus	100.00			Agustus	425.568.739	
					September	100.00			September	423.022.639	
					Oktober	100.00			Oktober	472.184.239	
					Nopember	100.00			Nopember	413.941.040	
					Desember	100.00			Desember	401.239.948	

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tabanan



[Signature]
Nyoman Srinadha Giri, S.E
Pembina Tk. I (IV/ b)
NIP. 19740624 200604 1 010

